

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

---

MEMORANDUM  
NOMOR 511/DJPSDKP.5/TU.140/IV/2025

Yth. : Direktur Jenderal PSDKP  
Dari : Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan  
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025  
Lampiran : Satu Berkas  
Tanggal : 17 April 2025

---

Sehubungan dengan telah selesainya penyusunan Laporan Triwulan I Tahun 2025, terlampir kami sampaikan Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan Triwulan I Tahun 2025.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

**Halid K. Jusuf**

Tembusan:  
Sesditjen PSDKP



# LAPORAN KINERJA TRIWULAN 1 TAHUN 2025

Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya  
Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan (PSDP) dalam mencapai tujuan dan sasaran selama tiga bulan pertama di tahun 2024. Penyusunan Laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, laporan ini merupakan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Masukan, tanggapan, serta saran yang membangun bagi pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan sangat dibutuhkan untuk dijadikan perbaikan dalam pencapaian target kinerja Direktorat PSDP di masa depan.

Jakarta, 17 April 2025

Direktur Pengawasan

Sumber Daya Perikanan,



**Ditandatangani  
Secara Elektronik**

Halid K. Jusuf

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.

Laporan Kinerja Direktorat PSDP Triwulan I tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal PSDKP atas pengelolaan kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan perikanan selama tiga bulan pertama di tahun 2025.

Tujuan pengukuran kinerja adalah menentukan tingkat kemajuan dalam meraih target kinerja sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja. Informasi indikator kinerja berisi informasi sasaran strategis, definisi, formula perhitungan/pengukuran, satuan pengukuran, jenis aspek target pada SKP, validitas, unit/pihak penanggung jawab, sumber daya, status data, jenis konsolidasi data, metode cascading, klasifikasi/polarisasi dan periode pelaporan.

Selama periode triwulan I tahun 2025, Direktorat PSDP telah berhasil mencapai seluruh target yang telah ditetapkan dengan memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 105%. Nilai tersebut diperoleh dari capaian yang hanya ditargetkan pada Triwulan I Tahun 2025, di antaranya:

Tabel. Capaian Direktorat PSDP Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Frekuensi	Target Tahunan	Target TW1	Capaian TW 1	%tase Capaian
1	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (Nilai)	Triwulan	82	25	90,00	120,00
2	Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Nilai)	Triwulan	100	100	100,00	100,00
3	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja Lingkup Direktorat PSDP (%)	Triwulan	100	100	100,00	100,00
4	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja Lingkup Direktorat PSDP yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	Triwulan	95	95	95,00	100,00

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan sehingga dapat meningkatkan pencapaian kinerja pengawasan sumber daya perikanan di tahun berikutnya.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	4
2.1 RENCANA STRATEGIS .....	4
2.2 PERJANJIAN KERJA .....	10
2.3 TARGET KINERJA .....	11
2.4 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA.....	13
2.5 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA .....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
3.1 CAPAIAN KINERJA.....	19
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA .....	20
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	31
BAB IV PENUTUP .....	32

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan dilaksanakan oleh Satker Pusat dan Satker UPT. Satker Pusat memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.

Objek pengawasan berupa pelaku usaha penangkapan ikan, pelaku usaha pengolahan hasil perikanan, pelaku usaha pembudidayaan ikan dan pelaku usaha distribusi hasil perikanan yang merupakan sebuah alat produksi pengelolaan perikanan serta aktivitasnya bersinggungan dengan ketersediaan sumber daya. Konsepsi pengawasan dan pengendalian pelaku usaha perikanan yang dibangun yaitu setiap alat produksi melakukan aktivitas usaha, maka pengawasan perikanan hadir guna memastikan aktivitas usaha tersebut sesuai ketentuan.

Peningkatan kepatuhan pelaku usaha perikanan dapat dicapai melalui beberapa pendekatan, dimana salah satunya yaitu pendekatan preventif, partisipatif dan koordinatif. Rincian output koordinasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan menggambarkan sebuah upaya Satker pusat untuk melakukan pendekatan berupa koordinasi, baik internal dan eksternal dalam kerangka pengawasan perikanan. Adapun hasil akhir yang hendak dicapai berupa kepatuhan pelaku usaha perikanan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan.

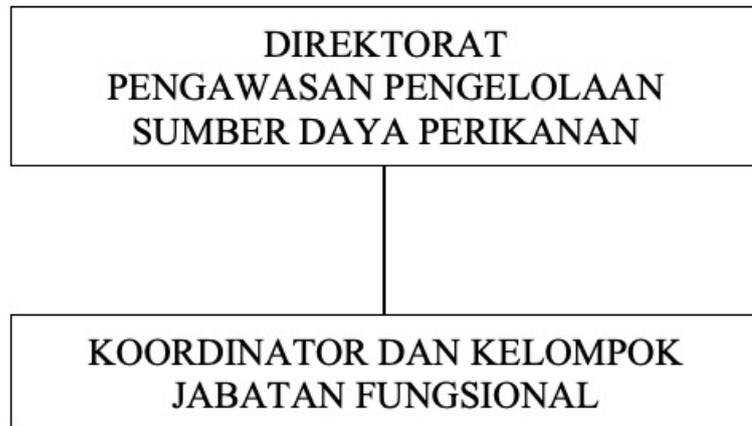
## 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Triwulan I Direktorat PSDP tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal PSDKP atas pengelolaankinerja dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan perikanan selama tiga bulan pertama di tahun 2025.

## 1.3 TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT PSDP

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan (PSDP) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan.

Direktorat PSDP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh 51 Pegawai Pusat terdiri atas 1 (satu) orang Direktur, Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Utama sebanyak 1 (satu) orang, Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Madya sebanyak 6 (enam) orang, Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan Ahli Muda sebanyak 8 (delapan) orang, Pejabat Fungsional Perencana Muda sebanyak 1 (satu) orang, Pejabat Fungsional Perencana Pertama sebanyak 1 (satu) orang, Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN Mahir sebanyak 1 (satu) orang, Pejabat Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama sebanyak 1 (satu) orang, Analis Pengawasan SDKP sebanyak 17 (tujuh belas) orang, Analis SDM Aparatur sebanyak 1 (satu) orang, Analis Keuangan sebanyak 1 (satu) orang, Pejabat Fungsional Arsiparis Terampil sebanyak 1 (satu) orang, Pengelola Keuangan sebanyak 1 (satu) orang, Pengawas Perikanan yang tersebar di 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP serta 8 (delapan) orang Pegawai Kontrak.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat PSDP

#### 1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- **Bab I Pendahuluan**, menjelaskan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi Direktorat PSDP serta sistematika pelaporan.
- **Bab II Perencanaan Kinerja**, menjelaskan tentang sasaran strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kerja Direktorat PSDP, dan pengukuran capaian kinerja.
- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan tentang analisis dan evaluasi pencapaian kinerja
- **Bab IV Penutup**, menyimpulkan secara menyeluruh Laporan Kinerja Direktorat PSDP Tahun 2025 dan menguraikan rekomendasi perbaikan di masa depan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan Kinerja merupakan tahap awal dalam siklus penyelenggaraan SAKIP. Komponen Perencanaan kinerja yang disusun oleh Direktorat PSDP meliputi:

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis (Renstra) merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Direktorat Jenderal PSDKP telah menetapkan Renstra tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran teknis secara berjenjang dari Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP sebagai salah satu unit Eselon I lingkup KKP. Renstra Ditjen. PSDKP memiliki nilai strategis karena merupakan tahapan akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2029. Penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMN 2025-2029 (Perpres 12 Tahun 2025) dengan memperhatikan arahan Presiden kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) serta mempertimbangkan arahan MKP kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen. PSDKP).

Sampai saat ini, rencana strategis Ditjen. PSDKP masih dalam proses sinkronisasi dengan kebijakan KKP. Adapaun proses penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periode renstra 2025-2029. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan bottom up dan top down dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan top down mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan bottom up dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan

pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut:

### **1. Pernyataan Visi dan Misi**

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi Indonesia Emas 2045 “Indonesia sebagai negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan” didasari oleh landasan pemikiran bahwa visi abadi Indonesia yang tertuang didalam Pembukaan UUD 1945 yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Pada tahap pertama, periode tahun 2025 – 2029, difokuskan kepada penguatan fondasi transformasi di mana sektor kelautan dan perikanan mengusulkan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 “Terwujudnya Ekologi Perairan yang Sehat sebagai Modal Dasar Peningkatan Kontribusi Ekonomi Biru untuk Mewujudkan Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045” yang mempertegas filosofi “ekologi sebagai panglima” untuk mewujudkan laut yang sehat, laut yang kaya akan sumber daya maritimnya, dan laut sebagai sumber kesejahteraan bagi Masyarakat Indonesia. Dalam rangka mewujudkan Visi KKP 2025-2029 tersebut maka diusulkan Visi Direktorat Jenderal (Ditjen) PSDKP 2020-2024, yaitu: “Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mengawal terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025-2029.

Visi Indonesia Emas 2045 akan dicapai melalui delapan misi yang dikelompokkan ke dalam tiga dimensi pokok yaitu: 1) Transformasi Indonesia; 2) Landasan Transformasi; dan 3) Kerangka Implementasi Transformasi. Dalam rangka memperkuat fondasi transformasi Indonesia Emas 2045, KKP mendukung pada dimensi Transformasi Indonesia (Misi Transformasi Sosial; Misi 2. Transformasi Ekonomi; Misi 3. Transformasi Tata Kelola) dan dimensi Landasan

Transformasi (Misi 4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomas; Misi 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi).

Visi Presiden terpilih 2025-2029 adalah Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas dengan Misi yang tertuang dalam 8 (delapan) Asta Cita di mana KKP mendukung pada:

- Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
- Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

Mengacu pada tugas dan fungsi KKP dalam rangka memperkuat fondasi transformasi Indonesia Emas 2045 serta mendukung pelaksanaan Asta Cita kedua, diusulkan 5 (lima) Misi KKP 2025-2029 di mana Ditjen PSDKP mendukung:

- Misi 1 KKP “Meningkatkan kualitas ekologi perairan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan” melalui:
  - Misi 1 Ditjen PSDKP “Meningkatkan ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan”;
  - Misi 2 Ditjen PSDKP “Meningkatkan kesadaran

masyarakat kelautan dan perikanan”.

- Misi 2 KKP “Meningkatkan kontribusi Ekonomi Biru secara Inklusif terhadap Ekonomi Nasional” melalui:
  - Misi 3 Ditjen PSDKP “Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan”;
  - Misi 4 Ditjen PSDKP “Meningkatkan efek jera sektor kelautan dan perikanan”.
- Misi 5 KKP “Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi KKP” melalui:
  - Misi 5 Ditjen PSDKP “Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP”.

## 2. Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Ditjen PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Ditjen PSDKP tahun 2025-2029 yang mendukung Tujuan KKP tahun 2025-2029 sebagaimana Tabel dibawah ini.

Tabel 1. Tujuan KKP dan Ditjen PSDKP Tahun 2025 – 2029

Tujuan KKP 2025-2029		Tujuan Ditjen PSDKP 2025-2029	
1	Pengelolaan ekologi perairan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif dan berkelanjutan	1	Peningkatan ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
		2	Peningkatan kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan
2	Optimalisasi potensi ekonomi biru yang belum dikelola dengan baik sebagai sumber pertumbuhan baru	3	Peningkatan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan
		4	Peningkatan efek jera sektor kelautan dan perikanan

3	Peningkatan kualitas reformasi birokrasi KKP	5	Peningkatan tata kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP
---	--	---	--

Berdasarkan Tujuan KKP tahun 2025-2029 dan Tujuan Ditjen PSDKP tahun 2025-2029 tersebut maka disusun rumusan Sasaran yang dilengkapi dengan ukuran indikator kinerja melalui suatu pohon kinerja yang disusun menggunakan pendekatan kerangka logis (logical framework) dalam 5 tahap, yakni: 1) Menentukan outcome/hasil strategis yang akan dijabarkan; 2) Mengidentifikasi *Critical Success Factor* (CSF) yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja/outcome strategis; 3) Menguraikan CSF kepada kondisi-kondisi antara sampai kepada kondisi paling teknis/operasional; 4) Merumuskan Indikator Kinerja; dan 5) Menerjemahkan ke dalam perencanaan.

Outcome/hasil tingkat KKP yang menggambarkan perubahan kondisi lingkungan dan masyarakat yang diharapkan berdasarkan mandat tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan, evaluasi isu strategis, serta ekspektasi masyarakat tercermin dalam 5 (lima) Sasaran Strategis KKP tahun 2025-2029, yakni:

- SS-1 Meningkatnya perlindungan dan ketahanan lingkungan perairan yang sehat;
- SS-2 Tatakelola sektor kelautan dan perikanan yang produktif dan berkelanjutan;
- SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah Dan Daya Saing Produk KP;
- SS-4 Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan;
- SS-5 Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas;

Mengacu pada mandat tugas dan fungsi Ditjen PSDKP sesuai peraturan perundang-undangan, isu strategis dan ekspektasi stakeholder terhadap peran pengawasan sumber daya kelautan dan

perikanan maka Sasaran Strategis yang representatif adalah SS-2 Tatakelola sektor kelautan dan perikanan yang produktif dan berkelanjutan dengan indikator kinerja “indeks kepatuhan sektor kelautan dan perikanan” dan SS-5 Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas dengan indikator kinerja “Indeks Reformasi Birokrasi KKP”.

### 3. Indikator Kinerja

*Critical Success Factor* (CSF) yang merupakan isu/permasalahan utama pada aspek pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi sebab bagi pencapaian SS-2 tata kelola sektor kelautan dan perikanan yang produktif dan berkelanjutan.

CSF SS-2 KKP tahun 2025-2029 tersebut sekaligus menjadi Sasaran Program pada Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dengan indikator kinerja program sebagai berikut:

1. Sasaran Program “Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan”:
  - a. Indikator Kinerja Program “Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”;
  - b. Indikator Kinerja Program “Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan SDKP”.
2. Sasaran Program “Meningkatnya kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan”:
  - a. Indikator Kinerja Program “Indeks kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan”;
  - b. Indikator Kinerja Program “Tingkat keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan”;
  - c. Indikator Kinerja Program “Tingkat keterlibatan masyarakat (Engagement Rate) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan”.
3. Sasaran Program “Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan”:

- a. Indikator Kinerja Program “Indeks kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan”.
4. Sasaran Program “Meningkatnya efek jera sektor kelautan dan perikanan”:
  - a. Indikator Kinerja Program “Indeks efek jera sektor kelautan dan perikanan”.

*Critical Success Factor* (CSF) bagi pencapaian SS-5 Meningkatkan Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas adalah dengan berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel di lingkungan Ditjen PSDKP yang sekaligus menjadi Sasaran Program dengan indikator kinerja “Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP”.

## 2.2 PERJANJIAN KERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan iktikad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam periode waktu satu tahun, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; (3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.

Tahun 2025 ditetapkan 5 (lima) sasaran kegiatan dengan 15 (lima belas) Indikator Kinerja. Sebagai Sasaran Program dan Indikator kinerja yang mengalami perubahan dan penambahan pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktorat PSDP Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN
SK 1. Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat perikanan secara efektif	1	Tingkat Kualitas Respon/Pemahaman Audiens Peserta Sosialisasi Penyadartahuan Masyarakat Perikanan (Nilai)	80
SK 2. Terselenggaranya intelijen perikanan secara efektif	2	Tingkat Akurasi dan Validitas Hasil Intelijen Perikanan (Nilai)	75
SK 3. Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	3	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (Nilai)	82
	4	Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Nilai)	100
	5	Indeks Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Nilai)	82
	6	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Perikanan (Nilai)	62
SK 4. Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Pengawasan sumber daya perikanan	7	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan (%)	100
SK 5. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya perikanan	8	Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat PSDP (%)	95
	9	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Direktorat PSDP (Nilai)	81
	10	Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Direktorat PSDP (Nilai)	86
	11	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat PSDP (%)	100
	12	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat PSDP yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	95
	13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Direktorat PSDP (Nilai)	80
	14	Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Unit Kerja lingkup Direktorat PSDP (Inovasi)	1
	15	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Direktorat PSDP (Nilai)	70

### 2.3 TARGET KINERJA

Target Kinerja adalah standar minimal pencapaian Kinerja yang ditetapkan untuk periode tertentu. Penetapan Target Kinerja merupakan

keepakatan antara atasan dan bawahan serta mempertimbangkan usulan pengelola Kinerja Organisasi. Rincian Target kinerja Direktorat PSDP Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 3. Rincian Target Kinerja Dit. PSDP Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS KONSOLIDASI DATA	TARGET 2025								
			TW1	TW2	Sd. TW2/ SM1	TW3	Sd. TW3	TW4	Sd. TW4/ SM2	TAHUN	
SK 1. Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat perikanan secara efektif	1	Tingkat Kualitas Respon/Pemahaman Audiens Peserta Sosialisasi Penyadartahuan Masyarakat Perikanan (Nilai)	Posisi Akhir	0	0	0	0	0	80	80	80
SK 2. Terselenggaranya intelijen perikanan secara efektif	2	Tingkat Akurasi dan Validitas Hasil Intelijen Perikanan (Nilai)	Posisi Akhir	0	0	0	0	0	75	75	75
SK 3. Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	3	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (Nilai)	Posisi Akhir	25	40	40	70	70	82	82	82
	4	Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Nilai)	Rata-rata	100	100	100	100	100	100	100	100
	5	Indeks Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Nilai)	Posisi akhir	0	40	40	0	0	82	82	82
	6	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Perikanan (Nilai)	Posisi Akhir	0	35	35	0	0	62	62	62
SK 4. Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Pengawasan sumber daya perikanan	7	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan (%)	Posisi akhir	0	50	50	0	0	100	100	100
SK 5. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya perikanan	8	Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat PSDP (%)	Posisi akhir	0	0	0	0	0	95	95	95
	9	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Direktorat PSDP (Nilai)	Posisi akhir	0	77	77	0	0	81	81	81
	10	Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Direktorat PSDP (Nilai)	Posisi akhir	0	0	0	0	0	86	86	86
	11	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat PSDP (%)	Rata-rata	100	100	100	100	100	100	100	100
	12	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat PSDP yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah	Rata-rata	95	95	95	95	95	95	95	95

		Dilengkapi dan Disampaikan (%)									
13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Direktorat PSDP (Nilai)	Posisi Akhir	0	0	0	0	0	80	80	80	
14	Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Unit Kerja lingkup Direktorat PSDP (Inovasi)	Posisi akhir	0	0	0	0	0	1	1	1	
15	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Direktorat PSDP (Nilai)	Posisi akhir	0	0	0	0	0	70	70	70	

## 2.4 RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

Rencana aksi merupakan dokumen yang berisi rencana kegiatan untuk mencapai Target, yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan waktu disertai dengan indikasi biaya pelaksanaan kegiatan. Rencana aksi bersifat spesifik dan berjumlah lebih dari satu. Rencana aksi kegiatan Direktorat PSDKP adalah sebagai berikut:

### 1. Terselenggaranya Sosialisasi Penyardartahuan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Secara Efektif

Sasaran kegiatan ini memiliki indikator kinerja Tingkat kualitas pemahaman peserta sosialisasi penyardartahuan masyarakat perikanan (nilai) dengan target 80%. Beberapa kegiatan pendukung pada sasaran strategis ini disajikan pada Tabel 3. berikut:

Tabel 4. Kegiatan Pendukung Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Penyardartahuan Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan

KEGIATAN PENDUKUNG (OUTPUT/KOMPONEN RKAHL)	ANGGARAN/PAGU (RP 000)	SATUAN OUTPUT/KOMPONEN	TARGET OUTPUT/KOMPONEN	TARGET OUTPUT/KOMPONEN PER BULAN													
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
Masyarakat yang memperoleh penyardartahuan dalam pemanfaatan sumber daya Perikanan	242.000	orang	100					50				100					

1	Perencanaan kegiatan penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan	36.900															
2	Pelaksanaan kegiatan penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan	160.470															
3	Monev dan pelaporan kegiatan penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan	44.630															

## 2. Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Sasaran kegiatan ini memiliki beberapa indikator kinerja yaitu :

- a. Indeks kepatuhan pelaku usaha perikanan dengan target sebesar 82 dan indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan dengan target 100. Kegiatan pendukung pada sasaran kegiatan ini disajikan pada Tabel 4. berikut:

Tabel 5. Kegiatan Pendukung Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan

KEGIATAN PENDUKUNG (OUTPUT/KOMPONEN RKAKL)	ANGGARAN/PAGU (RP 000)	SATUAN OUTPUT/KOMPONEN	TARGET OUTPUT/KOMPONEN	TARGET OUTPUT/KOMPONEN PER BULAN													
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	310.000	Lembaga	23			1	2	6	10	13	16	19	21	23			
1 Perencanaan/persiapan pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan	62.000																

2	Pelaksanaan dan Tindak lanjut pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan	186.000														
3	Monev dan pelaporan pengawasan kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan	62.000														

- b. Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan dengan target 82. Kegiatan pendukung pada sasaran kegiatan ini disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 6. Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan Tahun 2025

KEGIATAN PENDUKUNG (OUTPUT/KOMPONEN RKAKL)	ANGGARAN/PAGU (RP 000)	SATUAN OUTPUT/KOMPONEN	TARGET OUTPUT/KOMPONEN	TARGET OUTPUT/KOMPONEN PER BULAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Hasil pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha yang dipantau	1.194.840	Laporan	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Perencanaan pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan	196.732														
2 Pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan	851.748														
3 Monev Pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaku usaha perikanan	146.360														

- c. Indeks penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan dengan target 62. Kegiatan pendukung pada sasaran kegiatan ini disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. Indeks penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan

KEGIATAN PENDUKUNG (OUTPUT/KOMPONEN RKAHL)	ANGGARAN/PAGU (RP 000)	SATUAN OUTPUT/KOMPONEN	TARGET OUTPUT/KOMPONEN	TARGET OUTPUT/KOMPONEN PER BULAN												
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
Hasil pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha yang dipantau	400.160	Laporan	4				1			2		3				4
Tindak lanjut/pemantauan dan penilaian kepatuhan	400.160															

- d. Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan dengan target 100. Kegiatan pendukung pada sasaran kegiatan ini disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 8. Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan

KEGIATAN PENDUKUNG (OUTPUT/KOMPONEN RKAHL)	ANGGARAN/PAGU (RP 000)	SATUAN OUTPUT/KOMPONEN	TARGET OUTPUT/KOMPONEN	TARGET OUTPUT/KOMPONEN PER BULAN												
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
NSPK pengawasan pengelolaan sumber daya Perikanan	355.000	NSPK	2					1					2			
1 Perencanaan draft/rancangan NSPK	6.804															
2 Penyusunan draft/rancangan NSPK	277.052															
3 Uji Petik draft/rancangan NSPK	44.900															
4 Monitoring dan Evaluasi NSPK	26.244															

## 2.5 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan setiap bulan/triwulan/semester/tahun sesuai indikator kinerja. Setiap indikator kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Informasi indikator kinerja. Tujuan pengukuran kinerja adalah menentukan tingkat kemajuan dalam meraih target kinerja sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja. Informasi indikator kinerja berisi informasi sasaran strategis, definisi, formula perhitungan/pengukuran, satuan pengukuran, jenis aspek target pada SKP, validitas, unit/pihak penanggung jawab, sumber daya, status data, jenis konsolidasi data, metode cascading, klasifikasi/polarisasi dan periode pelaporan. Hal ini sebagai pedoman agar tidak terjadi perbedaan pendapat dalam merencanakan, mengukur, mengevaluasi dan menganalisa indikator kinerja dan capaiannya.

### 1. Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat perikanan

Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat perikanan adalah sebuah ukuran rata-rata/mean untuk menilai tingkatan kesadaran audiens dalam memanfaatkan sumber daya perikanan dan/atau melakukan kegiatan usaha perikanan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Audiens merupakan pelaku usaha di bidang perikanan, para tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat, asosiasi di bidang perikanan serta masyarakat perikanan yang mengikuti kegiatan sosialisasi penyadartahuan masyarakat.

$$X_{\text{sadar}} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i + \dots + X_n}{n}$$

Keterangan:

- $X_{sadar}$  : Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat perikanan  
 $x_i$  : Jumlah nilai kuesioner pemahaman masyarakat bidang pengawasan sumber daya perikanan  
 $n$  : Jumlah responden

parameter nilai:

Nilai Pemahaman Sangat Baik	:	>85
Nilai Pemahaman Baik	:	66 - 85
Nilai Pemahaman Cukup Baik	:	50 – 65
Nilai Pemahaman Kurang	:	< 50

## 2. Tingkat Akurasi dan Validitas Hasil Intelijen Perikanan

Intelijen ialah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.

Hasil intelijen perikanan yaitu produk pelaksanaan intelijen yang disusun oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi.

Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan adalah ukuran hasil intelijen perikanan terhadap kriteria/prosedur intelijen.

$$X_{intl} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n} \times 100$$

Keterangan:

$X_{intl}$	:	Tingkat Akurasi dan Validitas Hasil Intelijen Perikanan
$x_i$	:	Nilai akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan
$n$	:	jumlah hasil intelijen perikanan

Nilai akurasi dan validitas suatu hasil intelijen perikanan mengacu pada table berikut:

No	Kegiatan	Nilai
1	Perencanaan	0.2
2	Pengumpulan data	0.5
3	Pengolahan data	0.2
4	Penyajian	0.1

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 CAPAIAN KINERJA

Selama periode Triwulan I tahun 2025, Direktorat PSDP telah berhasil mencapai seluruh target yang telah ditetapkan dengan memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 105%. Nilai tersebut merupakan rata-rata capaian seluruh sasaran. Adapun nilai setiap sasaran merupakan hasil perhitungan atas IKU yang menjadi parameter pencapaiannya. Rincian pencapaian setiap sasaran dijelaskan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rincian Capaian Kinerja Direktorat PSDP Triwulan I Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	TARGET TW I	CAPAIAN TW I	%TASE CAPAIAN
SK 1. Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat perikanan secara efektif	1 Tingkat Kualitas Respon/Pemahaman Audiens Peserta Sosialisasi Penyadartahuan Masyarakat Perikanan (Nilai)	80	0	0	0
SK 2. Terselenggaranya intelijen perikanan secara efektif	2 Tingkat Akurasi dan Validitas Hasil Intelijen Perikanan (Nilai)	75	0	0	0
SK 3. Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	3 Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (Nilai)	82	25	90	120,00
	4 Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Nilai)	100	100	100	100,00
	5 Indeks Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Nilai)	82	0	0	0
	6 Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Perikanan (Nilai)	62	0	0	0
SK 4. Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Pengawasan sumber daya perikanan	7 Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan (%)	100	0	0	0
SK 5. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya perikanan	8 Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat PSDP (%)	95	0	0	0
	9 Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Direktorat PSDP (Nilai)	81	0	0	0
	10 Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Direktorat PSDP (Nilai)	86	0	0	0
	11 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat PSDP (%)	100	100	100	100,00

12	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat PSDP yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	95	95	95	100,00
13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Direktorat PSDP (Nilai)	80	0	0	0
14	Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Unit Kerja lingkup Direktorat PSDP (Inovasi)	1	0	0	0
15	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Direktorat PSDP (Nilai)	70	0	0	0

### 3.2 EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Direktorat PSDP telah melaksanakan kegiatan selama Triwulan I Tahun 2025 dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan terhadap Sasaran Strategis.

#### **SK1 – Terselenggaranya sosialisasi penyadartahuan masyarakat perikanan secara efektif**

##### **1. Tingkat Kualitas Respon/Pemahaman Audiens Peserta Sosialisasi Penyadartahuan Masyarakat Perikanan (Nilai)**

Tingkat kualitas respon/pemahaman audiens peserta sosialisasi penyadartahuan masyarakat perikanan adalah sebuah ukuran rata-rata/mean untuk menilai tingkatan kesadaran audiens dalam memanfaatkan sumber daya perikanan dan/atau melakukan kegiatan usaha perikanan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Kegiatan penyadartahuan bidang pengawasan sumber daya perikanan belum dilakukan dan belum dapat dihitung nilainya karena periode penghitungan pada akhir tahun.

#### **SK2 – Terselenggaranya intelijen perikanan secara efektif**

##### **2. Tingkat Akurasi dan Validitas Hasil Intelijen Perikanan (Nilai)**

Data dan informasi intelijen perikanan yaitu data dan informasi yang dikumpulkan oleh Pengawas Perikanan atau pihak yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber

daya perikanan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi

Penyelesaian analisis data dan informasi intelijen perikanan yaitu data intelijen yang sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah diolah atau dianalisis yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan, dan pengambilan keputusan/ penindakan yang akan ditempuh. Namun, pada periode Triwulan I Tahun 2024 indikator ini belum dapat dihitung capaiannya karena periode penghitungan pada akhir tahun.

### **SK3 – Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan**

#### **3. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (Nilai)**

Indeks kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan adalah nilai kumulatif persentase kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan. Kepatuhan pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat di bidang perikanan terdiri dari: 1) pengawasan rutin terhadap proyek usaha subsektor perikanan dalam OSS, 2) pengawasan operasional kapal perikanan; 3) pengawasan importasi hasil perikanan; 4) pengawasan pemanfaat sumber daya perikanan (illegal dan tindak lanjut aduan masyarakat); dan 5) pengawasan kegiatan perikanan yang menjadi atensi pimpinan.

Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan, pada periode Triwulan I Tahun 2025 ini UPT Ditjen PSDKP telah melaporkan hasil pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan kepada Direktorat PSDP dengan batas waktu pada 10 April 2025, terdapat rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Pemeriksaan Direktorat PSDP Triwulan I Tahun 2025

<b>UPT Ditjen PSDKP</b>	<b>Riksa UPT Ditjen PSDKP</b>	<b>Riksa Kapal UPT Ditjen PSDKP</b>
Pangkalan PSDKP Batam	3	745
Pangkalan PSDKP Benoa	3	527
Pangkalan PSDKP Bitung	1	6704
Pangkalan PSDKP Jakarta	21	2176
Pangkalan PSDKP Lampulo	1	467
Pangkalan PSDKP Tual	1	652
Stasiun PSDKP Ambon	3	679

Stasiun PSDKP Belawan	1	301
Stasiun PSDKP Biak	0	167
Stasiun PSDKP Cilacap	2	3223
Stasiun PSDKP Kupang	4	235
Stasiun PSDKP Pontianak	8	194
Stasiun PSDKP Tahuna	1	148
Stasiun PSDKP Tarakan	1	472
Direktorat PSDP	1	-
<b>Total</b>	<b>51</b>	<b>16.690</b>

Berdasarkan laporan yang telah diterima tersebut, Direktorat PSDP telah menyelesaikan verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (data detail terlampir) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Pemeriksaan Direktorat PSDP Triwulan I Tahun 2025

Subsektor	Total Pemeriksaan	Kepatuhan	
		Patuh	Tidak Patuh
Pengawasan Penangkapan Ikan	7489	7448	41
Pengawasan Pengolahan Ikan	23	18	5
Pengawasan Distribusi dan Pemasaran Hasil Perikanan	8	8	0
Pengawasan Pembudidayaan Ikan	19	11	8
<b>Total</b>	<b>7539</b>	<b>7485</b>	<b>54</b>

Dari hasil verifikasi tersebut, jika dikonversi ke dalam rumus yang telah ditetapkan dalam manual indikator kinerja Tahun 2025, dan diperoleh rincian sebagai berikut:

$$x_{pbbr}, x_{kp}, x_{pmt}, x_{imp}, x_{pnt} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_i + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

- $x_{pbbr}, x_{kp}, x_{pmt}, x_{imp}, x_{pnt}$  : Persentase kepatuhan pelaku usaha  
 $X_i$  : Jumlah Pelaku usaha yang dinyatakan patuh  
 $n$  : Jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhannya

a. Persentase Kepatuhan Proyek Usaha Perikanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Xpbbbr)

Jumlah Pelaku Usaha Yang Patuh	Jumlah Pelaku Usaha yang Diriksa	% Kepatuhan
6	7	86

b. Persentase Kepatuhan Kapal Perikanan (Xkp)

Jumlah Kapal Yang Patuh	Jumlah Kapal yang Diriksa	% Kepatuhan
7.447	7.488	99

c. Persentase Kepatuhan Pelaku Importasi Hasil Perikanan (Ximport)

Jumlah Pelaku Usaha Yang Patuh	Jumlah Pelaku Usaha yang Diriksa	% Kepatuhan
7	7	100

d. Persentase Kepatuhan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan (Xpmt)

Jumlah Pelaku Usaha Yang Patuh	Jumlah Pelaku Usaha yang Diriksa	% Kepatuhan
7	7	100

e. Persentase Kepatuhan Kegiatan Perikanan yang Menjadi Atensi Pimpinan (Xpn)

Jumlah Pelaku Usaha Yang Patuh	Jumlah Pelaku Usaha yang Diriksa	% Kepatuhan
18	30	60

Apabila dikonfersi ke dalam rumus capaian indikator Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Triwulan I Tahun 2025 akan didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut:

$$x_{psdp} = (x_{PBBR} * 0.4) + (x_{KP} * 0.2) + (x_{IMP} * 0.2) + (x_{PMT} * 0.1) + (x_{PN} * 0.1)$$

Keterangan:

$X_{psdp}$	: Indeks kepatuhan pelaku usaha perikanan
$X_{pbbr}$	: Persentase kepatuhan proyek usaha subsektor perikanan dalam OSS
$X_{kp}$	: Persentase kepatuhan kapal perikanan
$X_{pmt}$	: Persentase kepatuhan pelaku importasi hasil perikanan
$X_{imp}$	: Persentase kepatuhan pemanfaat sumber daya perikanan
$X_{pn}$	: Persentase kepatuhan kegiatan perikanan yang menjadi atensi pimpinan

$$\begin{aligned} X_{PSDP} &= X_{PBR} * 0,4 + X_{KP} * 0,2 + X_{IMP} * 0,2 + X_{PMT} * 0,1 + X_{PN} * 0,1 \\ X_{PSDP} &= 34 + 20 + 20 + 10 + 6 \\ X_{PSDP} &= 90 \end{aligned}$$

Dengan demikian, capaian indikator kinerja sebesar 90 di mana telah mencapai target yang semestinya yaitu 25. Direktorat PSDP pada Triwulan I Tahun 2025 terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain:

- Adanya modul pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko yang baru diimplementasikan tahun 2025 secara serentak di seluruh UPT Ditjen PSDKP. Hal tersebut memicu permasalahan pada sistem (*bug*) ketika digunakan oleh banyak *user*.
- Perubahan anggaran setelah efisiensi juga mengubah target riksa sehingga Pengawas Perikanan menyesuaikan kembali rencana pengawasan sepanjang tahun 2025 yang telah disusun sebelumnya.

Dalam menghadapi kendala yang terjadi pada periode Triwulan I Tahun 2025 akan dilakukan beberapa upaya di periode Triwulan II Tahun 2025, antara lain:

- Melakukan sosialisasi atau ToT terhadap modul pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko kepada seluruh Satwas/Wilker oleh perantara UPT Ditjen PSDKP.
- Berkoordinasi dengan UPT Ditjen PSDKP secara berkala terkait kendala yang dihadapi saat penggunaan modul di lapangan.

- c. Membuat penanggung jawab di setiap UPT Ditjen PSDKP oleh Operator Monev Direktorat PSDP agar dapat memantau secara berkala terkait proses penjadwalan pengawasan usaha perikanan yang telah disesuaikan targetnya dengan perubahan terakhir.

#### 4. Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Nilai)

Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan dengan capaian sebesar 100, dari target sebesar 100. Data capaian dihitung berdasarkan nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha perikanan dibagi dengan jumlah hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan. Pada periode triwulan I Tahun 2025, Pengawas Perikanan Direktorat PSDP telah melakukan pengawasan pemanfaat jenis ikan membahayakan dan merugikan sesuai dengan hasil analisis data *open sources intelligent* sebanyak 1 unit usaha. Hasil pengawasan yang dilakukan sudah memenuhi seluruh bobot nilai kualitas pemeriksaan yaitu:

- a. Persiapan dengan bobot 10 dan telah dibuktikan dengan tersedianya surat tugas pemeriksaan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha dengan bobot 70 dan telah dibuktikan dengan tersedianya data dukung hasil pemeriksaan berupa form pengawasan; dan
- c. Laporan hasil pengawasan dengan bobot 20 dan telah dibuktikan dengan laporan kepatuhan yang telah diunggah pada linkree pelaporan Direktorat PSDP Tahun 2025.

Sehingga didapati hitungan capaian kinerja Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan sebagai berikut:

$$X_{ver} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + \dots + X_n)}{n}$$

Keterangan:

$X_{ver}$  : Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan

$X_i$  : Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha perikanan

$n$  : Jumlah hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan

$$X_{ver} = \frac{100}{1} = 100$$

## 5. Indeks Verifikasi Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Nilai)

Indeks verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha perikanan merupakan ukuran rata-rata terhadap kualitas pelaksanaan tahapan verifikasi hasil pemeriksaan pelaku usaha oleh Pengawas Perikanan baik di UPT maupun di Direktorat PSDP.

Pada triwulan I tahun 2025, indikator kinerja tersebut belum dapat dihitung jumlahnya karena periode pengukurannya akan dilaksanakan pada Triwulan II dan akhir tahun.

## 6. Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pembinaan dan Perbaikan Pelaku Usaha Perikanan (Nilai)

Pada Triwulan I Tahun 2024 dalam menyelesaikan tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan memperoleh capaian sebesar 20%. Data capaian dihitung berdasarkan jumlah tindak lanjut pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha perikanan yang diselesaikan dibagi dengan total rekomendasi pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha perikanan.

Indeks penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan pelaku usaha perikanan adalah nilai perbandingan banyaknya rekomendasi tindak lanjut pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha perikanan yang telah diselesaikan dengan banyaknya

rekomendasi pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha perikanan kemudian dikali dengan 100

Jika tidak ditemukan rekomendasi pelaku usaha perikanan berupa pembinaan dan perbaikan, maka nilai capaian persentase penyelesaian tindak lanjut pembinaan dan perbaikan kepatuhan pelaku usaha perikanan dihitung sesuai target.

Namun demikian, pada Triwulan I Tahun 2025, indikator ini belum dapat dihitung capaiannya karena akan dilakukan pengukuran pada periode Triwulan II dan akhir tahun.

#### **SK4 – Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang Pengawasan sumber daya perikanan**

##### **7. Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan (%)**

Direktorat PSDP setiap tahun telah menyelesaikan tugasnya dalam menyusun rancangan NSPK bidang pengawasan sumber daya perikanan. Penyusunan NSPK ini tentu saja dipengaruhi oleh adanya perubahan kebijakan di bidang perikanan sehingga perlu penyesuaian strategi pengawasan. Namun, pada Triwulan I tahun 2025 ini rancangan NSPK bidang Pengawasan SDKP lingkup Direktorat PSDP masih dalam tahap persiapan, sehingga persentasenya belum dapat dihitung karena periode penghitungannya pada Triwulan II dan akhir tahun.

#### **SK 5 – Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya perikanan**

##### **8. Persentase Penyerapan Anggaran Direktorat PSDP (%)**

Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran digunakan untuk mengukur kinerja penyerapan anggaran lingkup Direktorat PSDP tahun 2025. Dalam rangka mencapai target realisasi anggaran, dilaksanakan aktivitas Pengendalian berupa :

- a. Memastikan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan sesuai dengan Kaidah;
- b. Memastikan Penyelesaian Kegiatan Kontraktual sesuai dengan

aturan yang berlaku;

c. Memastikan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Akuntabel, dan

d. Meminimalisir Deviasi halaman III DIPA

Pada Triwulan I tahun 2025 indikator kinerja tersebut belum dapat dihitung realisasinya karena periode penghitungan akan diakumulasikan pada akhir tahun 2025.

#### **9. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Direktorat PSDP (Nilai)**

Pencapaian sasaran ini diidentifikasi ke dalam 1 indikator kinerja yaitu indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan. Indikator Kinerja tersebut mengukur Profesionalitas ASN berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.

Pada Triwulan I tahun 2025, IKU tersebut belum dapat dilakukan analisa karena periode penghitungan dapat dilakukan pada semester 1 dan semester 2. Nantinya Direktorat PSDP memperoleh nilai pada laman [ropeg.kkp.go.id](http://ropeg.kkp.go.id).

#### **10. Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Direktorat PSDP (Nilai)**

Penilaian mandiri SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja.

Hasil penilaian oleh Inspektorat Mitra berdasarkan lembar kerja evaluasi yang disusun itjen dengan mengacu pada lembar kerja evaluasi AKIP oleh KEMENPAN RB. Namun, pada periode ini belum dapat dinilai indikatornya karena periode penghitungan terdapat pada akhir tahun.

#### **11. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat PSDP (%)**

Persentase capaian hasil pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko Direktorat PSDP Triwulan I Tahun 2025 sebesar 100%. Capaian tersebut diperoleh dari Evaluasi Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tahun 2025 dengan tujuan untuk:

1. memastikan manajemen risiko telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2016 dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2024;
2. memastikan pemanfaatan manajemen risiko dalam pengendalian kebijakan dan kegiatan;
3. memastikan pemantauan terhadap aktivitas respon manajemen risiko; dan
4. memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan manajemen risiko.

#### **12. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja lingkup Direktorat PSDP yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)**

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat PSDP pada Triwulan I Tahun 2025 tidak terdapat temuan, realisasinya dapat disamakan dengan target yaitu sebesar 95%, sehingga persentase capaiannya sebesar 100%.

#### **13. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal unit Kerja lingkup Direktorat PSDP (Nilai)**

Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia

kearsipan, dan prasarana serta sarana

Nilai pengawasan kearsipan lingkup Ditjen PSDKP akan diukur oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi oleh Kepala Biro Umum dan PBJ dengan periode tahunan.

#### **14. Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Unit Kerja lingkup Direktorat PSDP (Inovasi)**

Melalui Program Budaya Kerja Hasilkan Inovasi Unit Kerja (HIU), Direktorat PSDP terus berkomitmen mendorong pengembangan inovasi Pengawasan SDKP dan pengembangan kompetensi SDM yang terlibat di dalamnya, sehingga setiap unit kerja khususnya Direktorat PSDP harus menghasilkan inovasi. Inovasi sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Kriteria Inovasi yaitu memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan. Untuk itu, indikator kinerja tersebut belum dapat dihitung jumlahnya karena periode pelaporan akan dilaksanakan pada akhir tahun.

#### **15. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Direktorat PSDP (Nilai)**

Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Direktorat PSDP. Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Direktorat PSDP, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja. Untuk itu, indikator kinerja tersebut belum dapat dihitung nilainya karena periode pelaporan akan dilaksanakan pada akhir tahun.

### 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Direktorat PSDP memiliki alokasi anggaran awal TA 2024 sebesar Rp 11.768.640.000 (Sebelas milyar tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus empat puluh ribu rupiah). Setelah mengalami *Automatic Adjustment* (AA) 1 kali kemudian dana tersebut dialihkan ke satuan kerja lain sehingga total anggaran Direktorat PSDP menjadi Rp 10.068.640.000 (Sepuluh milyar enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp 852.994.451 (Delapan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) atau 8,47% dari pagu anggaran.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2025 Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Direktorat PSDP pada periode triwulan bersangkutan, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun kesimpulan dan saran kegiatan penyusunan laporan kinerja triwulan I tahun 2025 adalah:

#### **1.1. Kesimpulan**

- a. Periode Triwulan I Tahun 2025 Direktorat PSDP telah berhasil mencapai seluruh target yang telah ditetapkan dengan memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 105%.
- b. Pada Triwulan I Tahun 2025, dari 7539 unit usaha perikanan yang telah dilakukan pemeriksaan, sebesar 7485 unit usaha perikanan dinyatakan patuh. Sehingga diperoleh indeks kepatuhan sebesar 90 di mana telah mencapai target yang semestinya yaitu 82.

#### **1.2. Saran**

- a. Untuk meningkatkan dan mengontrol Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebaiknya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- b. Perlu dipertahankan agar seluruh target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
- c. Berkoordinasi dan memantau secara berkala terkait proses penjadwalan pengawasan usaha perikanan yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan UPT Ditjen PSDKP.